

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen muncul sebagai revisi atas teori pertumbuhan neoklasik yang memandang kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal sebagai faktor yang hanya berpengaruh pada tingkat *output* dalam jangka pendek tanpa mampu mengubah laju pertumbuhan dalam keadaan keseimbangan jangka panjang. Romer (1986) menjadi pelopor dasar memperlihatkan bahwa apabila modal didefinisikan secara luas dan mencakup pengetahuan yang menghasilkan eksternalitas pasti antar perusahaan, maka perbandingan hasil pada tingkat perekonomian agregat dapat bersifat permanen atau meningkat, sehingga kebijakan yang memengaruhi modal dalam pengertian luas tersebut dapat mengubah laju pertumbuhan secara permanen.

Barro (1990) menggolongkan bidang pemerintahan ke dalam kegiatan produksi agregat. Dalam teori tersebut, *output* nasional dihasilkan dari gabungan modal khusus dan pelayanan umum yang disediakan pemerintah, dengan karakter perbandingan hasil permanen terhadap kedua faktor tersebut secara bersamaan meskipun masing-masing faktor mengalami hasil yang menurun apabila digunakan sendiri. Pelayanan umum dalam perumusan ini berperan sebagai *input* komplementer, artinya keberadaan infrastruktur, layanan hukum, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas marginal dari setiap unit modal khusus yang digunakan oleh bidang khusus.

Barro (1990) menjelaskan bahwa seluruh pelayanan umum yang bermanfaat dibiayai oleh penerimaan pajak berupa pungutan proporsional atas pendapatan. Penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan langsung bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Barro (1990) memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat seiring bertambahnya perbandingan belanja umum yang bermanfaat terhadap *output* hingga mencapai titik optimum, sebelum kemudian menurun apabila beban pajak telah melewati batas kebutuhan pembiayaan barang umum yang bermanfaat tersebut.

Hubungan struktural inilah yang menjadi dasar teoritis mengapa pengujian pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara langsung tanpa harus melibatkan variabel pendanaan umum atau produktivitas. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak dan belanja umum yang bermanfaat terhubung kuat dengan anggaran pemerintah, koefisien pengaruh penerimaan pajak bagi pertumbuhan ekonomi pada dasarnya telah menggambarkan proses transmisi melalui pembiayaan barang umum tersebut secara tersirat.

Berdasarkan keadaan tersebut, pengujian pengaruh PPh, PPN dan PPnBM, serta Cukai terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai gambaran *reduced form* atau bentuk tereduksi. Ketiga kelompok penerimaan pajak tersebut merupakan anggota utama Penerimaan Dalam Negeri yang membiayai belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk belanja modal untuk infrastruktur serta belanja pada bidang pendidikan dan Kesehatan. Nurhayati et al. (2024) dalam bukunya mengenai ekonomi pembangunan Indonesia menjelaskan bahwa relevansi teori pertumbuhan

ekonomi di Indonesia terlihat dari usaha pemerintah meningkatkan pendanaan umum dan membawa perubahan dengan pembiayaan yang berasal dari penerimaan negara. Ketika penerimaan tersebut membiayai penyediaan barang umum yang komplementer terhadap kegiatan produksi bagian khusus, peningkatan penerimaan pajak secara struktural berpotensi meningkatkan produktivitas perekonomian secara agregat.

Dengan demikian, penelitian yang menguji pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi tidak berbeda dengan teori pertumbuhan endogen. Penggunaan data *time series* jangka panjang dari 1987 hingga 2024 pada penelitian ini searah dengan arah teori pertumbuhan endogen yang berpusat pada perbandingan jangka panjang, sehingga kerangka pemikiran penelitian tetap berpedoman pada landasan teori yang digunakan.

2.1.2 Teori Sosial Politik

Dalam karya *Finanzwissenschaft* oleh Wagner (1883), menegaskan bahwa sebuah sistem perpajakan tidak hanya bertujuan untuk menyediakan penerimaan negara secara efisien, namun juga harus memenuhi tujuan sosial politik yang lebih tinggi, yaitu memperbaiki ketimpangan penyaluran yang disebabkan oleh mekanisme pasar menuju keadaan yang lebih merata. Dalam perumusan kebijakan perpajakan, setiap persoalan ekonomi harus dilihat dari sosial politik secara menyeluruh, dan solusi yang diambil harus mengutamakan penyelesaian atas permasalahan masyarakat, bukan sekadar kepentingan individu wajib pajak. Kebijakan perpajakan sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk mengatasi persoalan sosial seperti ketimpangan pendapatan, kesenjangan antar wilayah, dan fluktuasi atau ketidaktepatan ekonomi (Bhatia, 1988).

Dalam karya *Grundlegung der Politischen Okonomie* oleh Wagner (1894) dengan salah satu hukum empiris mengenai perkembangan historis yang dinamai *Wagner's Law*, menyatakan bahwa fungsi dan pengeluaran negara akan terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban dan industrialisasi suatu negara. Semakin tinggi pendapatan suatu negara maka semakin besar tuntutan masyarakat atas penyediaan layanan umum, perlindungan sosial, dan kesejahteraan oleh negara sehingga pengeluaran negara termasuk kebutuhan untuk membiayai lewat pajak akan terus meningkat lebih besar dari pertumbuhan pendapatan itu sendiri. Kebijakan perpajakan termasuk pemungutan PPh, PPN dan PPnBM, serta Cukai, dirancang untuk melayani kepentingan masyarakat secara luas, bukan sekadar kepentingan individu wajib pajak yang menanggung beban pajak tersebut secara langsung.

2.1.3 Pajak

Pajak merupakan pembayaran wajib yang dikeluarkan oleh warga negara sebagai wajib pajak kepada pemerintah untuk membiayai kepentingan-kepentingan suatu negara. Menurut teori ekonomi, semua pajak berdampak pada seberapa cepat ekonomi tumbuh (Balasoiu et al., 2023). Namun, hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi negara-negara berkembang karena adanya ketidakstabilan atau bahkan penurunan pendapatan pajak yang dihasilkan oleh negara tersebut. Sehingga, pemaksimalan penerimaan pajak pada suatu negara memang harus dilakukan untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang lebih baik misalnya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

2.1.4 Klasifikasi Pajak

Pajak diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu pajak langsung serta pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah suatu jenis pajak yang dibebankan dan wajib dibayarkan oleh individu, kelompok, maupun organisasi secara langsung kepada pemerintah. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang tidak ditanggung oleh individu atau organisasi, melainkan kepada pihak lain. Biasanya pajak tidak langsung dibebankan kepada pembeli atau konsumen akhir karena sebuah barang atau jasa yang mereka konsumsi (Omodero et al., 2021). Di Indonesia pajak yang dikelompokkan menjadi pajak langsung, seperti PPh, pajak bumi dan bangunan, sekaligus pajak kendaraan bermotor. Sementara pajak tidak langsung di Indonesia, meliputi PPN dan PPnBM, pajak bea masuk, pajak ekspor, beserta cukai.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian adalah sebuah aspek yang amat krusial bagi sebuah negara. Menurut Adefolake & Omodero (2022), pertumbuhan ekonomi dilaksanakan pengukuran dengan tiga indikator yaitu PDB, Produk Nasional Bruto, beserta pendapatan per kapita. Etim (2021) menjelaskan bahwa secara konseptual, pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan maupun *output* nasional secara bertahap sebagai akibat dari sejumlah kebijakan pemerintah, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi demi memastikan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi bagi negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai total penduduk yang besar, pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang amat krusial. Pertumbuhan ekonomi secara umum bisa digambarkan melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian yang akan diteliti tentang “Pengaruh Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Cukai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dari 1987 sampai 2024” ditampilkan oleh tabel berikut.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tax Revenue and Ecomonic Growth in Nigeria (2000-2021)	Adefolake & Omodero (2022)	Independen: Pajak penghasilan minyak bumi, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan perusahaan. Dependen: PDB.	Pajak penghasilan minyak bumi dan pajak pertambahan nilai berdampak signifikan positif, sementara pajak penghasilan perusahaan berdampak signifikan negatif.
2.	Comparative Analysis of the Effect of Direct and Indirect Taxation Revenue on Economic Growth of Nigeria (1980-2019)	Etim et al. (2021)	Independen: Pajak penghasilan minyak bumi, pajak penghasilan perusahaan (pajak langsung), pajak pertambahan nilai, cukai (pajak tidak langsung). Dependen: Produk Domestik Bruto (PDB).	Pajak langsung (termasuk pajak penghasilan) memiliki dampak yang lebih negatif terhadap perekonomian dibandingkan pajak tidak langsung (termasuk pajak pertambahan nilai dan cukai).
3.	Effect of Tax revenue on Economic Growth of Nigeria (1990-2020)	Nwuzor (2024)	Independen: Pajak penghasilan minyak bumi, pajak penghasilan perusahaan, pajak pertambahan nilai. Dependen: PDB.	Ketiga variabel independen berdampak signifikan positif bagi PDB.
4.	Examining the Relationship Between Tax Revenue dan Economic Growth in Indonesia (1983-2021)	Yossinomita et al. (2025)	Independen: Penerimaan pajak. Dependen: Pertumbuhan ekonomi.	Penerimaan pajak beserta pertumbuhan ekonomi saling memberi dampak satu dengan yang lainnya.

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5.	The Impact of Tax Revenue on Economic Growth in Nigeria (2014-2023)	Augustine & Ebiafue (2026)	Independen: Pajak penghasilan perusahaan, pajak penghasilan minyak bumi, pajak pertambahan nilai. Dependen: Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.	Ketiga variabel independen berdampak signifikan bagi PDB per kapita.

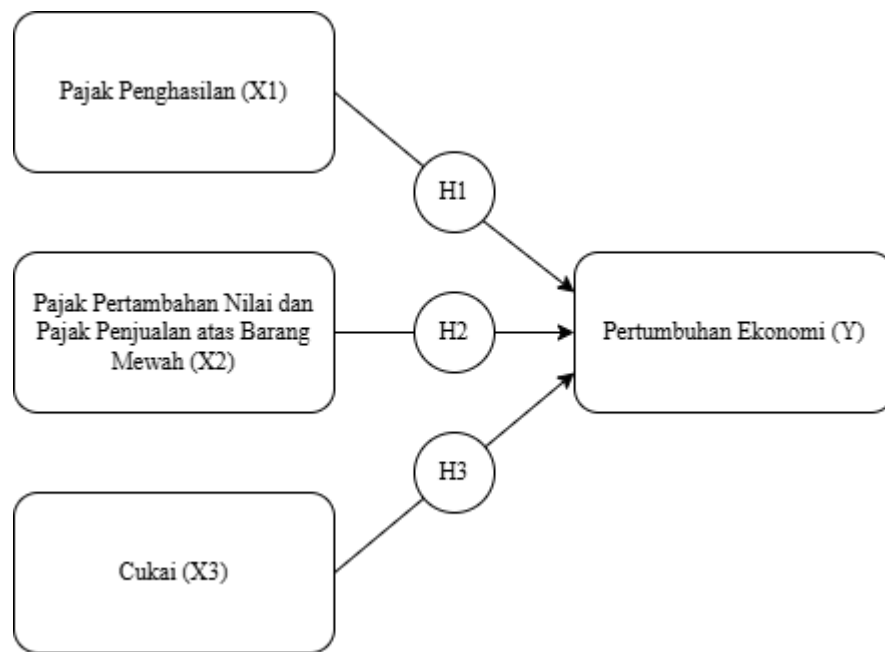
Sumber: Data diolah, 2026

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut Adefolake & Omodero (2022) adalah gambaran hubungan antar variabel penelitian beserta kemungkinan arah pengaruhnya. Terdapat tiga variabel independen (bebas) yang dimanfaatkan pada penelitian ini yaitu PPh, PPN dan PPnBM, serta Cukai. Variabel dependen (terikat) pada penelitian ini adalah PDB. Pada penelitian ini, variabel independen mewakili sumber penerimaan pajak di Indonesia dan variabel dependen menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

PPh, PPN dan PPnBM, serta Cukai adalah tiga sumber utama penerimaan dalam negeri yang membiayai belanja pemerintah, mulai dari belanja modal hingga anggaran pendidikan dan kesehatan yang bersifat komplementer terhadap kegiatan produksi pada sektor tertentu. Ketika penerimaan pajak membiayai penyediaan barang umum yang komplementer terhadap produksi, peningkatan penerimaan pajak secara struktural berpotensi menggerakkan produktivitas perekonomian secara agregat, yang pada akhirnya tergambar pada laju pertumbuhan PDB.

Gambaran mengenai hubungan antar variabel dan kemungkinan pengaruhnya disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah, 2026

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pajak Penghasilan bagi Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan teori pertumbuhan endogen, Barro (1990) menjabarkan bahwa penerimaan pajak menjadi sumber pembiayaan untuk pelayanan umum yang bersifat komplementer terhadap modal khusus dalam kegiatan produksi. Ketika pelayanan umum tersebut, misalnya pembangunan infrastruktur dan alokasi di bidang pendidikan, dibiayai secara penuh, produktivitas modal secara agregat akan meningkat sehingga mendorong laju pertumbuhan ekonomi, sampai pada titik optimum tertentu.

Pajak penghasilan termasuk sebagai penyumbang penerimaan pajak tertinggi di Indonesia setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2025). Semakin tinggi realisasi penerimaan pajak penghasilan, semakin besar pula peran anggaran pemerintah untuk membiayai belanja produktif sebagaimana dijelaskan dalam teori

pertumbuhan endogen. Namun, karena pajak penghasilan dipungut langsung atas penghasilan masyarakat dan badan usaha, Kneller et al. (1999) mengingatkan bahwa pajak jenis ini berpotensi mengurangi motivasi masyarakat untuk bekerja lebih giat atau berinvestasi lebih banyak. Dengan demikian, arah pengaruh pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi secara teori tidak dapat dipastikan sepenuhnya positif dan perlu diuji secara empiris.

Sebagaimana dalam penelitian Augustine & Ebiafue (2026) dan Nwuzor (2024) ditemukan bahwa bagian pajak penghasilan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Temuan ini berbanding terbalik dengan penelitian Adefolake & Omodero (2022) yang menemukan pajak penghasilan berpengaruh negatif dan signifikan. Perbedaan perolehan ini memperkuat perlunya pengujian ulang dengan keadaan Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik hipotesis berupa:

H01: Pajak penghasilan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Ha1: Pajak penghasilan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

2.4.2 Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah bagi Pertumbuhan Ekonomi

Merujuk pada teori pertumbuhan endogen Barro (1990), penerimaan dari pajak PPN dan PPnBM turut membiayai pelayanan umum yang bersifat komplementer terhadap kegiatan produksi. Selain dari pembiayaan tersebut, PPN dan PPnBM juga mempunyai keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi karena dipungut atas nilai tambah barang beserta jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Konsumsi dari rumah tangga memberi sumbangan sejumlah 54,04% bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2025), sehingga menjadi komponen pengeluaran terbesar PDB. PPN dan PPnBM tidak langsung tergolong dalam perhitungan Produk Domestik Bruto, melainkan sebagai indikator kegiatan konsumsi yang nantinya terhubung pada kegiatan ekonomi dan tergambar dalam pertumbuhan PDB. Kedua jalur ini yaitu jalur pembiayaan pelayanan umum dan jalur kegiatan konsumsi menjadi dasar logis mengapa PPN dan PPnBM diperkirakan berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

Adefolake & Omodero (2022) menemukan bahwa PPN berpengaruh signifikan terhadap PDB Nigeria selama periode 2000-2021. Penelitian Etim et al. (2021) membandingkan kelompok pajak langsung dan pajak tidak langsung di Nigeria pada periode 1980-2019, dengan pajak pertambahan nilai sebagai salah satu bagian pajak tidak langsung, dan menemukan bahwa kelompok pajak tidak langsung memiliki pengaruh yang relatif kecil dibandingkan kelompok pajak langsung. Berdasarkan kedua penelitian tersebut terlihat bahwa adanya keterkaitan di antara PPN dan PPnBM dengan pertumbuhan ekonomi, meskipun besaran dan arah pengaruh yang tidak konsisten serta akan lebih bertentangan dengan yang lainnya.

Berdasarkan pada penjabaran tersebut, berikut hipotesis yang diambil:

H02: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Ha2: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

2.4.3 Pengaruh Cukai Bagi Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan teori pertumbuhan endogen Barro (1990), penerimaan cukai sebagai bagian dari penerimaan negara turut membiayai pelayanan umum yang bersifat komplementer terhadap produktivitas perekonomian secara agregat. Realisasi penerimaan cukai di Indonesia berada pada urutan ketiga terbesar setelah PPh serta PPN dan PPnBM (Badan Pusat Statistik, 2025). Meski perbandingannya lebih kecil dibandingkan dua jenis pajak lainnya, penerimaan cukai tetap berkontribusi terhadap kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai belanja produktif, sehingga secara teori tetap memiliki jalur pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun dengan besaran yang dapat berbeda dari pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai.

Penelitian Etim et al. (2021) di Nigeria pada periode 1980-2019 menguji perbandingan antara kelompok pajak langsung dan kelompok pajak tidak langsung, yang mana cukai termasuk salah satu bagian dalam kelompok pajak tidak langsung bersama dengan PPN. Perolehan penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kelompok pajak tidak langsung memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan kelompok pajak langsung terhadap perekonomian.

Berdasarkan pada penjabaran tersebut, berikut hipotesis yang diambil:

H03: Cukai tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Ha3: Cukai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia